Kata Pengantar

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang krusial dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good service. Hal yang dirasa sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2017 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverenment) BAPPEDA Kabupaten Pemalang yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2016-2021.

Diharapkan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2017 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang dalam periode Tahun 2017. Hasil review terhadap laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Pemalang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG

Ir. SUDARYONO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 199002 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang, sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Pemalang, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

LKjIP Tahun 2017 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran adalah sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pemerintahan dinilai sangat baik.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Gambaran Umum 4

B. Lingkungan Strategis 6

C. Tujuan dan Manfaat 12

D. Sistematika Penyajian 13

BAB II Perencanaan Kinerja..... 15

A. Perencanaan Strategis Bappeda 15

B. Rencana Kinerja Tahunan 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 24

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 26

C. Capaian Kinerja & Realisasi Keuangan Bappeda Kab. Pemalang Tahun 2017 32

D. Realisasi Anggaran..... 37

BAB IV PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu instrument sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka itu Pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan laporan yang harus dibuat oleh setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada suatu rencana strategik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang sebagai implementasi Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1. Kedudukan

BAPPEDA Kabupaten Pemalang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah ditata kembali organisasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang termasuk Bappeda. Terakhir Bappeda Kabupaten Pemalang ditetapkan kembali penataan organisasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Mendasari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Bappeda dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, Bappeda Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Dalam menjalankan tugasnya Bappeda Kabupaten Pemalang menjalankan fungsi sebagai berikut :
    1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
    2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
    3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugass dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
    4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya
    5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Pemalang ditetapkan penataan organisasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala
b. Sekretariat, terdiri dari :
   - Sub Bagian Bina Program
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
   - Sub Bidang Sosial
   - Sub Bidang Kebudayaan
d. Bidang Ekonomi dan SDA, terdiri dari :
   - Sub Bidang
   - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
   - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Sub Bidang Perhubungan
f. Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat
   - Sub Bidang Pendidikan
   - Sub Bidang Kesehatan
g. Unit Penelitian dan Pengembangan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Kepala = eselon II.b
b. Sekretaris = eselon III.a
c. Kepala Bagian/Bidang = eselon III.b
d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang = eselon IV.a

Adapun struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

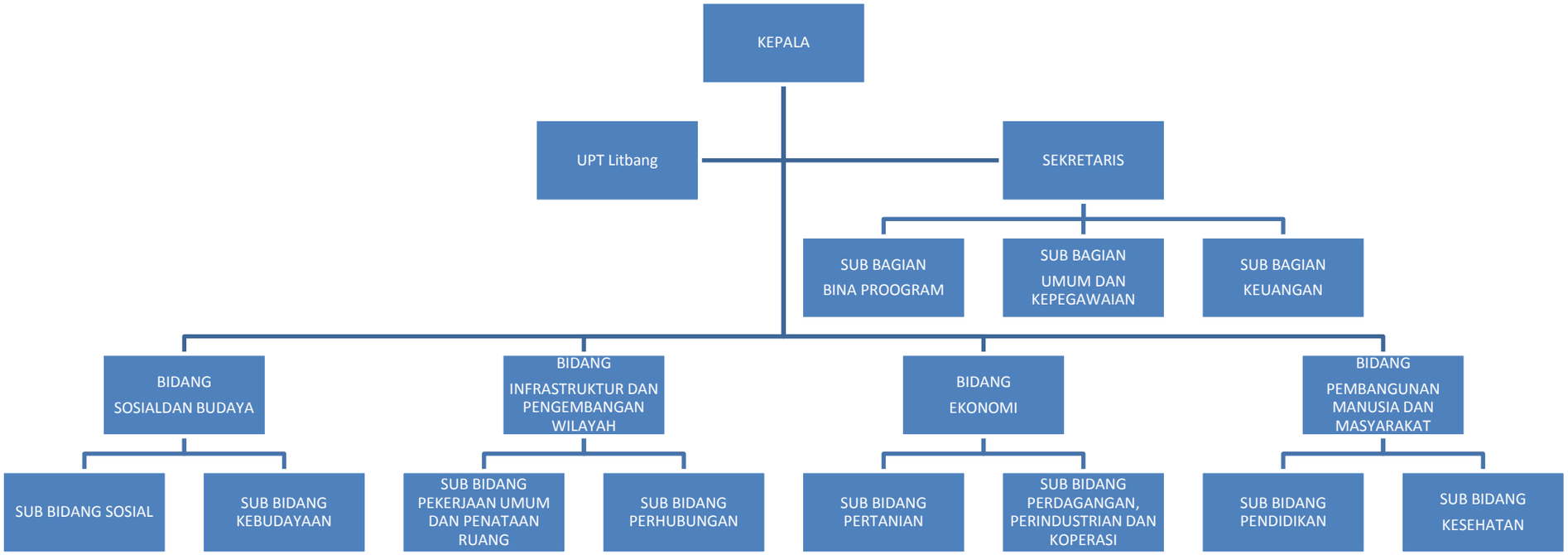

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA didukung oleh personil sebanyak 45 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.1

Tabel 1.1

Jumlah dan Pegawai Bappeda Kab. Pemalang Berdasarkan Jabatannya

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala BAPPEDA	1 orang
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	5 orang
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	12 orang
4.	Fungsional Perencana	2 Orang
5.	Pelaksana	25 orang
Jumlah		45 orang

b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kab. Pemalang

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	S 3	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	-	2	3	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang/unit Pelaksana	-	-	-	1	5	5	1	12
4.	Fungsional Perencana	-	-	-	-	1	1	-	2
5.	Staf	-	1	11	1	10	2	-	25
Jumlah		-	1	11	2	18	13	1	45

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa tingkat pendidikan ASN pada Bappeda Kabupaten Pemalang terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Doktor (S3), ASN Bappeda Kabupaten Pemalang 71,1 % memiliki pendidikan minimal S-1.

c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Kabupaten Pemalang terbanyak adalah golongan III (50,98%), secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruangnya

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	5	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang/unit Pelaksana	-	-	7	5	12
4.	Fungsional Perencana	-	-	1	1	2
5.	Pelaksana	-	13	12	-	25
Jumlah		-	13	21	12	45

d. Perincian Berdasarkan Diklat

1. Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	1
2.	Kepala Bagian/Bidang	-	5	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/UPT	-	-	10	10
4.	Pelaksana	-	-	-	-
Jumlah		1	5	10	16

2. Diklat Fungsional

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		Pertama	Muda	Madya	
1.	Perencana	1	3	1	5
2.	Pranata Komputer	1	-	-	1
Jumlah		2	3	1	6

e. Perincian Berdasarkan Umur

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Menurut Umur

NO	KOMPOSISI MENURUT UMUR	JUMLAH
1.	Umur 20 – 30 Tahun	1
2.	Umur 31 – 40 Tahun	17
3.	Umur 41 – 50 Tahun	19
4.	Umur 51 Tahun ke atas	8
Jumlah		45

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Kantor pada Bappeda Kab. Pemalang

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	7 unit
2.	Sepeda Motor	30 unit

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
3.	Sepeda	2 unit
4.	Mesin Tik	1unit
5.	Mesin Fotocopy	1 unit
6.	Lemari besi	11 buah
7.	Rak Kayu	9 buah
8.	Filling Besi	47 buah
9.	Brankas	1 buah
10.	Rotary filling	4 buah
11.	Lemari Kaca	19 buah
12.	Lemari Kayu	15 buah
13.	Papan Visuil	1 buah
14.	Alat Penghancur Kertas	7 buah
15.	Papan Pengumuman	5 buah
16.	Papan Tulis	4 buah
17.	Banner	4 buah
18.	Meja Pingpong	1 buah
19.	Meja Rapat	25 buah
20.	Meja tulis	40 buah
21.	Meja telepon	2 buah
22.	Meja podium	1 buah
23.	Kursi rapat	76 buah
24.	Kursi tamu	4 buah
25.	Kursi Tangan	8 buah
26.	Kursi Putar	21 buah
27.	Kursi biasa	41 buah
28.	Kursi Lipat	226 buah
29.	Meja computer	8 buah
30.	Tenda	1 buah
31.	Meja Biro	2 buah
32.	Jam mekanis	5 buah
33.	Lemari es	2 buah
34.	AC	25 buah
35.	Kipas Angin	25 buah
36.	Kompor gas	1 buah
37.	Tripod	4 buah
38.	Taplak Meja	10 buah
39.	Televisi	7 buah
40.	Cassette recorder	1 buah
41.	Amplifier	5 buah
42.	Sound system	14 buah
43.	Wireless	4 buah
44.	Microphone	4 buah
45.	Unit Power Supply	15 buah
46.	Dispenser	3 unit
47.	Handy Cam	10 unit
48.	Personal computer lainnya	10 unit
49.	P.C Unit	2 unit

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
50.	Lap top	10 unit
51.	Note Book	41 unit
52.	CPU	15 unit
53.	Hard Disk	7buah
54.	Printer	42 unit
55.	Scanner	3 unit
56.	Monitor	22 unit
57.	Flashdisk	48 unit
58.	Meja Kerja	9 unit
59.	Meja tamu	4 unit
60.	Kursi kerja	24 unit
61.	Lemari Buku	8 unit
62.	Proyektor	2 unit
63.	CD Player	3 unit
64.	Camera Electronic	13 unit
65.	Video Mixer	1 unit
66.	Slide Proyektor	3 unit
67.	Layar film	2 unit
68.	Telephone (PABX)	22 unit
69.	Facsimile	3 unit
70.	Antena Parabola	1 unit
71.	Mesin absensi	1 buah
72.	Mesin Penghisap Debu	1 buah
73.	AC Split	12 buah
74.	Electric benner	2 buah
75.	Running text	2 buah
76.	Alat Pemadam portable	3 buah
77.	Mainframe	1 buah
78.	Router	2 buah
79.	Telpon Mobile	1 buah
80.	Penyekat Ruangan	3 buah
81.	CCTV	12 buah
82.	Pompa Air	4 buah
83.	GPS	1 buah
84.	Rainer	1 buah
85.	LCD	10 buah
86.	Drone	1 buah

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

LKjIP Bappeda Pemalang Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan penilaian kinerja yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintah serta kewenangan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (*good governance).*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2017 mempunyai manfaat untuk :

1. mendorong Bappeda untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. menjadikan Bappeda yang akuntabel sehingga menjadi organisasi yang efesien, efektif dan responsip terhadap perkembangan perencanaan pembangunan menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Bappeda
3. terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Bappeda
4. sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2017 merupakan pencapaian kinerja Bappeda selama Tahun 2017. Capain Kinerja tersebut terukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2017 merupakan jabaran dari rencana strategis Bappeda tahun 2016-2021. Indikator yang ditetapkan atas rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian penilain kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantiatif dari setiap sasaran.

Secara keseluruhan sistimatika penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Bappeda adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Lingkungan Strategis
C. Tujuan dan Manfaat
D. Sistimatika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Bappeda
B. Rencana Kinerja Tahunan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BAPPEDA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Bappeda Kab. Pemalang Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Pemalang tahun 2017 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis. Pada Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2016 - 2021.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016– 2021, dirumuskan visi pembangunan daerah yang merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Kabupaten Pemalang selama lima tahun dalam menjalankan amanat publik untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu: **"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATI DIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA"**

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal dan eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui Tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Pemalang menentukan langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu dalam RPJMD Kabupaten Pemalang dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan untuk tahun 2016–2021 sebagai berikut:

Tujuan	**Sasaran**	
Misi 1: Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong		
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	a.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak		
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	a.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal
	b.	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	c.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	d.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

Tujuan	Sasaran	
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	e.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	f.	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
	g.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran		
Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	a.	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas
	b.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	c.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang
Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran	d.	Menurunnya tingkat pengangguran
Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	e.	Menurunnya penduduk miskin
Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata.	a.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	b.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	c.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
Misi 5: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati		
Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	a.	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai
Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah		
Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	a.	Meningkatnya nilai realisasi investasi
Meningkatkan kualitas	b.	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam

Tujuan	Sasaran	
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik		meningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	c.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	g.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
Misi 7: Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat		
Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	a.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Faktor penentu keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi tersebut.

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategik sebelumnya. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dimaksudkan mencakup faktor eksternal dan internal Bappeda yaitu dapat diidentifikasikan antara lain:

- adanya jumlah SDM yang memadai dan mempunyai motivasi kerja tinggi
- adanya dukungan atasan
- adanya sarana dan prasarana
- tersedianya peraturan perundangan yang mendukung
- adanya dukungan dana yang tersedia dalam APBD
- adanya semangat koordinasi dan kerjasama yang positif dari bagian/unit kerja lain.

5. Tujuan dan Sasaran Bappeda

Dari visi dan misi Kepala daerah, maka Bappeda Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran PD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan	1. Tingkat keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN	Meningkatkan kualitas dokumen	1. Prosentase jumlah program dalam RPJMD	Indikator RPJMD

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
	pembangunan daerah		perencanaan pembangunan	yang mendukung Program RPJMN	
		2. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD		2. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Indikator RPJMD
		3. Nilai SAKIP		3. Nilai SAKIP	Indikator RPJMD
			Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	
				Peningkatan SDM yang berkualitas	
			Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	
			Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
			Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
			Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	

5. Kebijakan dan Program

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Program

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Prosentase jumlah program dalam RPJMD yang mendukung Program RPJMN	1. Program Kerjasama Pembangunan
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai SAKIP	3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Pengembangan Data dan informasi
2	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan SDM yang berkualitas	8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	9. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 11. Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar
5	a. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	a. Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	12. Program perencanaan sosial budaya
	b. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya	b. Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya	
6	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2017 disusun dengan mendasari target kinerja yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan juga APBD Tahun 2017, RKT Bappeda Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rencana dan Target Kinerja sesuai dengan RPJMD Tahun 2017

Mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang target kinerja Bappeda Kab. Pemalang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	40%
		Peningkatan SDM yang berkualitas	40%
2	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	40%
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40%
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	40%
5	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	40%
6	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	40%

2. Rencana dan Target Kinerja SKPD Tahun 2017

Program		Indikator Program	Definisi Operasional	Target Tahunan	
				Nilai	Satuan
1		2	3	4	5
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasinya yang tersusun	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersedia	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%

Program		Indikator Program	Definisi Operasional	Target Tahunan	
				Nilai	Satuan
1		2	3	4	5
3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersusun	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perkotaan	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perkotaan sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
6	Program Kerjasama Pembangunan	dokumen kerjasama	Prosentase tersedianya dokumen Kerjasama sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
7	Pengembangan Data dan Informassi	dokumen data yang tersedia	Prosentase tersedianya dokumen Data dan Informasi sesuai kebutuhan dalam satu tahun	100	%
8	Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan	Prosentase tersedianya kebijakan bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan di daerah	tersedianya dokumen kebijakan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan	100	%
		Prosentase tahapan terselenggaranya Sistem Inovasi Daerah	tahapan pengembangan Sistem Inovasi Daerah	40	%
		Prosentase tersedianya arahan kebijakan hasil kaijan pengembangan / inovasi kebijakan pembangunan di daerah	jumlah arahan kebijakan hasil penelitian / kajian dibandingkan dengan jumlah kajian yang dilaksanakan	40	%
		Prosentase terselenggaranya fasilitasi kegiatan Penelitan dan Inovasi di Kabupaten Pemalang	jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan inovasi dibandingkan dengan jumlah kegiatan penelitian yang diselenggarakan	100	%
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12	bln

Program		Indikator Program	Definisi Operasional	Target Tahunan	
				Nilai	Satuan
1		2	3	4	5
10.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12	bln
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dibandingkan dengan kebutuhan tiap tahun	40	%
12.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Prosentase tersusunnya dokumen evaluasi kinerja SKPD dalam periode 5 (Lima Tahun)	40	%
13.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Prosentase tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam periode 5 (Lima Tahun)	40	%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Bappeda adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Bappeda Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Sebelum menguraikan hasil analisis kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator Kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluran (*output*) dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- Hasil(outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara terget dengan realisasinya melalui media berupa formulir PKK (pengukuran kinerja kegiatan) dan formulir PPS (pengukuran pencapaian sasaran). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2016-202.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas.

Hasil evaluasi Kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan kinerja SKPD dibantu dengan tabel skala nilai yang ditunjukkan dengan notasi warna sebagai berikut dibawah :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Pemalang beserta target serta capaian realisasinya dijelaskan pada tabel 3.2, hasil pengukuran kinerja menunjukkan capain kinerja sasaran adalah 100%. Secara rinci tingkat capain seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	81%
		Nilai LKJiP	CC
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	90%
2	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	40%
		Peningkatan SDM yang berkualitas	40%
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40%
5	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	40%
6	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	40%
7	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	40%

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2017 Bappeda Kabupaten Pemalang program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yaitu:

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan laporan kinerja pemerintah daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	a. Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	100	100	81	100	123%	90	123%
		b. Nilai LKJiP	CC	CC	CC	CC	100	B	100
		c. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	70	90	90	100	111	95	95

Capaian kinerja untuk indikator Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan Program RPJMD adalah 100% artinya seluruh program yang ada di dalam RKPD merupakan program-program yang ada dalam RPJMD, dengan didigunakannya

aplikasi e-planning yaitu SIMRENBANG, program-program yang tidak ada dalam RPJMD tidak dapat diusulkan dalam RKPD,

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
2.	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	a. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	20	20	40	40	100	100	40
		b. Peningkatan SDM yang berkualitas	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya sarana prasarana dan aparatur penunjang perencanaan capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
3.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang

ditetapkan, beberapa output kegiatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan / kajian data dan informasi bidang ekonomi SDA yaitu :
   a) Studi Penguatan daya beli masyarakat di Kab. Pemalang
   b) Studi Pengembangan Sentra Budidaya Telur Omega dan Telur Itik di Kabupaten Pemalang
   c) Studi Pengembangan Sentra Budidaya Mangga di Kab. Pemalang
   d) Studi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Pemalang
   e) Penyusunan ROADMAP Pencapaian Visi Misi Pemalang Hebat
   f) Penyusunan Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kab. Pemalang
2. Fasilitasi penyelengagraan kegiatan FEDEP dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada rumpun bidang ekonomi dan SDA

4. **Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
4.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, beberapa output kegiatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan / kajian data dan informasi bidang Sosial dan Budaya yaitu :
   a) Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya : Kajian Warisan Budaya Takbenda (Makanan, Minuman serta permainan Rakyat di Kab. Pemalang)
   b) Dokumen Kajian Dokumen Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya (RPKP)

c) Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
d) Kajian Profil Kelompok Seni di Kabupaten Pemalang
e) Penyusunan DED Kawasan Gumelem Kel. Mulyoharjo
f) Penyusunan DED Kota Kampung KB Kel. Kebondalem
g) Penyusunan DED Kota Kawasan Kel. Pelutan

2. Fasilitasi penyelengagraan kegiatan TKPKD, KOTAKU dan KOMPAK serta kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada rumpun bidang Sosial dan Budaya

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
5.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembanganb Wilayah capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, beberapa output kegiatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan / kajian data dan informasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu :
   a) Studi Identifikasi Kebutuhan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang
   b) Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Pemalang
   c) Studi Identifikasi Ruang Terbuka Hijau pada Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Pemalang
   d) Penyusunan Dokumen Studi Pengembangan Drainase di Kawasan Kota Pemalang

e) Studi analisis standar biaya bidang infrastruktur di Kab. Pemalang
f) Studi Kelembagaan pengelola air irigasi di Kab. Pemalang

2. Fasilitasi penyelengagraan kegiatan Pamsimas serta kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada rumpun bidang Inftasruktur dan Pengembangan Wilayah.

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
6.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pengembangan Manusia dan masyarakat capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, beberapa output kegiatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan / kajian data dan informasi bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat :
   a) Kajian Profil Organisasi Pemuda, Klub Olah Raga dan Lapangan Olah Raga di Kabupaten Pemalang
   b) Kajian Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) di Kab. Pemalang
   c) Kajian Strategi Pengendalian Jumlah Penduduk melalui Program KB di Kab. Pemalang
   d) Kajian Konsep Pengembangan BLK di Kab. Pemalang
2. Fasilitasi penyelengagraan kegiatan GAKY dan PUS serta kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada rumpun bidang Inftasruktur dan Pengembangan Wilayah.

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
7.	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	20	20	40	40	100	100	40

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan capaiannya adalah 40% terhadap target kinerja selama lima tahun periode RPJMD, artinya capaian untuk tahun 2017 dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, beberapa output kegiatan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang penelitian dan pengembangan
   a) Dokumen Kajian Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Buah Durian di Kecamatan Warungpring dan Randudongkal
   b) Dokumen Kajian IKM terhadap Program Pengentasan Kemiskinan
   c) Dokumen Kajian IKM terhadap Distribusi Kebutuhan Pokok di Kab. Pemalang
   d) Dokumen Kajian Kualitas Air Sungai Comal untuk mengatasi Tingkat Pencemaran Air Sungai Comal
   e) Dokumen Kajian Strategi Peningkatan IPM di Kabupaten Pemalang
   f) Dokumen Identifikasi Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk Penguatan City Branding melalui Festival Tahunan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017
2. Fasilitasi kegiatan peneriamaan mahasiswa KKN di Kabupaten Pemalang selama tahun 2017
3. Perumusan dan penyusunan persiapan pengembangan SIDA dan Teknopark di Kabupaten Pemalang

C. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan BAPPEDA Kab. Pemalang Tahun 2017

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2017 secara umum capaian sasaran strategis yang sudah di targetkan sudah dapat tercapai sesuai target pada tahun 2017, sedangkan untuk realisasi keuangan rata-rata realisasinyanya > 90 %, untuk program dengan realisasi anggaran yang kurang dari 90% lebih diakibatkan adanya efisiensi belanja khususnya pada belanja makan-minum rapat dan biaya koordinas, secara rinci capaian kinerja dan realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Kinerja						Keuangan					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%	PROGRAM	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	a Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	81%	100%	123,46	1 Program Kerjasama Pembangunan	1.122.471.000	1.022.989.800	91,1373	99.481.200	8,8626967

Kinerja						Keuangan					
No	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**PROGRAM**	**Target (Rp)**	**Realisasi(Rp)**	**%**	**Sisa Anggaran**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		b Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	90%	100%	111,11	2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.120.218.500	1.069.984.409	95,51569	50.234.091	4,4843119
		C Nilai LKJiP	CC	CC	100	3 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	110.300.000	81.115.800	73,54107	29.184.200	26,45893
						4 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	330.000.000	324.657.259	98,38099	5.342.741	1,6190124
						5 Program Pengembangan Data dan informasi	484.450.000	475.015.875	98,05261	9.434.125	1,9473888
2	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang	a Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	40%	40%	100	6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.679.185.300	1.555.904.139	92,65828	123.281.161	7,3417246

Kinerja						Keuangan					
No	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**PROGRAM**	**Target (Rp)**	**Realisasi(Rp)**	**%**	**Sisa Anggaran**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	perencanaan					7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.479.300.000	1.415.115.737	95,66117	64.184.263	4,3388267
		b Peningkatan SDM yang berkualitas	40%	40%	100	8 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	145.050.000	120.524.500	83,09169	24.525.500	16,908307
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	40%	40%	100	9 Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	977.500.000	871.955.680	89,20263	105.544.320	10,797373
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan	40%	40%	100	10 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	357.050.000	339.765.642	95,15912	17.284.358	4,8408789

Kinerja						Keuangan						
No	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Realisasi**	**%**		**PROGRAM**	**Target (Rp)**	**Realisasi(Rp)**	**%**	**Sisa Anggaran**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
		bidang sosial dan budaya				11	Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar	232.400.000	227.761.340	98,00402	4.638.660	1,9959811
5	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	40%	40%	100	12	Program perencanaan sosial budaya	1.825.620.500	1.507.732.063	82,58738	317.888.437	17,412624
6	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	40%	40%	100							

Kinerja						Keuangan					
No	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**PROGRAM**	**Target (Rp)**	**Realisasi(Rp)**	**%**	**Sisa Anggaran**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
7	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	40%	40%	100	13 Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan	938.500.000	811.882.250	86,5085	126.617.750	13,491502

D. Realisasi Anggaran

Gambaran realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

No.	BELANJA	*Anggaran*	*Realisasi*
A.	**Sebelum Perubahan**		
	1. Belanja Langsung	7.489.021.550	3.998.059.061
	2. Belanja Tidak Langsung	4.119.915.000	2.384.988.369
	JUMLAH	11.608.936.550	6.383.047.430
B.	**Setelah Perubahan**		
	1. Belanja Langsung	10.802.045.300	9.824.404.494
	2. Belanja Tidak Langsung	3.767.236.000	3.420.709.957
	JUMLAH	14.569.281.300	13.245.114.451

Secara rinci realisasi program / kegiatan Bappeda Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyediaan jasa surat menyurat	80.000.000,00	70.198.000,00	87,75
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	194.550.000,00	165.829.508,00	85,24
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.350.000,00	10.348.200,00	99,98
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.000.000,00	120.911.850,00	93,01
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.000.000,00	64.068.642,00	98,57
6	Penyediaan alat tulis kantor	145.185.300,00	138.521.000,00	95,41
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	115.000.000,00	99.058.050,00	86,14
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	58.000.000,00	57.707.500,00	99,50
9	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90
10	Penyediaan makanan dan minuman	180.900.000,00	163.873.932,00	90,59
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	599.650.000,00	566.557.457,00	94,48
12	Penyediaan jasa keamanan	80.550.000,00	78.850.000,00	97,89

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	225.000.000,00	220.140.000,00	97,84
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	462.250.000,00	459.382.616,00	99,38
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	262.800.000,00	232.326.961,00	88,40
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	116.000.000,00	115.847.000,00	99,87
5	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	94.400.000,00	83.932.442,00	88,91
6	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	139.850.000,00	139.550.718,00	99,79
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000,00	24.836.000,00	91,99
8	Pengadaan Mebeler	100.000.000,00	95.600.000,00	95,60
9	Pengadaan Komputer dan perlngkapannya	52.000.000,00	43.500.000,00	83,65

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	75.050.000,00	61.938.000,00	82,53
2	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	70.000.000,00	58.586.500,00	83,70

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	55.300.000,00	36.680.000,00	66,33
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	25.000.000,00	21.507.800,00	86,03
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000,00	22.928.000,00	76,43

5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	330.000.000,00	324.657.259,00	98,38

6. Program pengembangan data / informasi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah	269.450.000,00	263.470.375,00	97,78
2	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah	215.000.000,00	211.545.500,00	98,39

7. Program kerjasama pembangunan Daerah

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	401.800.000,00	333.059.500,00	82,89
2	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya	77.439.500,00	74.354.350,00	96,02
3	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang Prasarana Wilayah	85.000.000,00	69.658.450,00	81,95
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.100.000,00	149.646.200,00	97,11
5	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen bidang kesehatan	102.000.000,00	97.403.500,00	95,49
6	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen bidang pendidikan dan ketenagakerjaan	137.131.500,00	134.546.800,00	98,12
7	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen bidang sosial dan budaya	165.000.000,00	164.321.000,00	99,59

8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wlayah strategis dan cepat tumbuh	119.395.000,00	106.036.235,00	88,81
2	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	237.655.000,00	233.729.407,00	98,35

9. Program Perencanaan Pengembangan kota- kota menengah dan besar

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Koordinasi perencanaan penganan perumahan	47.100.000,00	44.992.400,00	95,53

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
2	Koordinasi perencanaan air minum ,drainase,dan sanitasi perkotaan	185.300.000,00	182.768.940,00	98,63

10. Program Perencanaan pembangunan daerah

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyusunan rancangan RKPD	68.500.000,00	67.134.000,00	98,01
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	502.518.500,00	496.855.961,00	98,87
3	Penetapan RKPD	42.850.000,00	35.800.000,00	83,55
4	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	200.000.000,00	196.957.700,00	98,48
5	Koordinasi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga	168.350.000,00	157.671.709,00	93,66
6	Koordinas bidang kesehatan, PP, PA,Pengendalian penduduk dan KB	138.000.000,00	115.565.039,00	83,74

11. Program perencanaan pembangunan ekonomi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	328.110.000,00	264.002.411,00	80,46
2	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100.960.000,00	94.672.919,00	93,77
3	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Daerah	284.990.000,00	268.747.800,00	94,30
4	FEDEP	263.440.000,00	244.532.550,00	92,82

12. Program perencanaan sosial dan budaya

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penguatan Kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)	95.000.000,00	88.138.448,00	92,78
2	Koordinasi penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	77.000.000,00	62.411.100,00	81,05
3	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	463.445.384,00	192.652.133,00	41,57
4	Fasilitasi dan Stimulasi perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis	783.155.116,00	767.803.775,00	98,04

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	masyarakat			
5	Fasilitasi dan Stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	171.300.000,00	167.709.897,00	97,90
6	Koordinasi perencanaan bidang social	41.080.000,00	37.950.810,00	92,38
7	Koordinasi perencanaan bidang budaya	194.640.000,00	191.065.900,00	98,16

13. Program Optomalisasi penelitian dan pengembangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintah daerah	409.000.000,00	391.662.500,00	95,76
2	Fasilitasi Peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	150.000.000,00	96.897.700,00	64,60
3	Fasilitasi pada kegiatan kuliah kerja nyata (KKN)	150.000.000,00	131.452.400,00	87,63
4	Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	100.000.000,00	88.571.000,00	88,57
5	Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	50.000.000,00	42.744.000,00	85,49
6	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	79.500.000,00	60.554.650,00	76,17

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Pemalang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam Tahun 2017 Bappeda Kabupaten Pemalang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang menguraikan keberhasilan/kegagalan yang dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pemalang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Bappeda Kabupaten Pemalang menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan rencana Strategis tahun 2013.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda Tahun 2017, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD Dengan RPJMD adalah 100 % (Jumlah program di RPJMD 186, jumlah program di RKPD 186)
2. Nilai LkjIP Kabupaten Pemalang adalah CC sesuai dengan target yang ditetapkan
3. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang Diakomodir Dalam RKPD adalah 100% yaitu 100 usulan fisik dan 50 usulan non fisik
4. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
   a) Studi Identifikasi Kebutuhan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang
   b) Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Pemalang
   c) Studi Identifikasi Ruang Terbuka Hijau pada Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Pemalang

d) Penyusunan Dokumen Studi Pengembangan Drainase di Kawasan Kota Pemalang
e) Studi analisis standar biaya bidang infrastruktur di Kab. Pemalang
f) Studi Kelembagaan pengelola air irigasi di Kab. Pemalang

5. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang Ekonomi dan SDA
   a) Studi Penguatan daya beli masyarakat di Kab. Pemalang
   b) Studi Pengembangan Sentra Budidaya Telur Omega dan Telur Itik di Kabupaten Pemalang
   c) Studi Pengembangan Sentra Budidaya Mangga di Kab. Pemalang
   d) Studi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Pemalang
   e) Penyusunan ROADMAP Pencapaian Visi Misi Pemalang Hebat
   f) Penyusunan Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kab. Pemalang
6. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang Sosial dan Budaya
   a) Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya : Kajian Warisan Budaya Takbenda (Makanan, Minuman serta permainan Rakyat di Kab. Pemalang)
   b) Dokumen Kajian Dokumen Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya (RPKP)
   c) Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
   d) Kajian Profil Kelompok Seni di Kabupaten Pemalang
   e) Penyusunan DED Kawasan Gumelem Kel. Mulyoharjo
   f) Penyusunan DED Kota Kampung KB Kel. Kebondalem
   g) Penyusunan DED Kota Kawasan Kel. Pelutan
7. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
   a) Kajian Profil Organisasi Pemuda, Klub Olah Raga dan Lapangan Olah Raga di Kabupaten Pemalang
   b) Kajian Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) di Kab. Pemalang
   c) Kajian Strategi Pengendalian Jumlah Penduduk melalui Program KB di Kab. Pemalang
   d) Kajian Konsep Pengembangan BLK di Kab. Pemalang
8. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen kajian bidang penelitian dan pengembangan
   g) Dokumen Kajian Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Buah Durian di Kecamatan Warungpring dan Randudongkal
   h) Dokumen Kajian IKM terhadap Program Pengentasan Kemiskinan
   i) Dokumen Kajian IKM terhadap Distribusi Kebutuhan Pokok di Kab. Pemalang
   j) Dokumen Kajian Kualitas Air Sungai Comal untuk mengatasi Tingkat Pencemaran Air Sungai Comal

k) Dokumen Kajian Strategi Peningkatan IPM di Kabupaten Pemalang

l) Dokumen Identifikasi Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk Penguatan City Branding melalui Festival Tahunan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :

- Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan Perda Kab. Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya perubahan tugas pokok dan fungsi pada tiap SKPD sehingga menimbulkan permaslahan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan
- Belum optimalnya penerapan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda;
- Kurangnya persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya;

Upaya untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada yaitu:

- Meningkatkan koordinasi sektoral terkait penyusunan dokumen perencanan dan penganggaran
- Penyusunan kebijakan pembangunan dengan mendasarkan hasil kajian-kajian yang telah dilakukan
- Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta pengiriman ASN Bappada untuk mengikuti bintek terkait pelaksanaan tupoksi.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG

Ir. SUDARYONO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 199002 1 001